



PERAN KOPERASI MERAH PUTIH SEBAGAI OFFTAKER PRODUK PERTANIAN LOKAL UNTUK STABILISASI HARGA

Ahmad Nuron¹, Ahmadi², Eva Novaria³
STISIPOL Candradimuka^{1,2,3}
e-mail: ronipoetrapaba85@gmail.com

Diterima: 1/1/2026; Direvisi: 8/1/2026; Diterbitkan: 15/1/2026

ABSTRAK

Volatilitas harga komoditas pertanian menjadi masalah struktural yang persisten di Indonesia, sering kali merugikan petani akibat dominasi tengkulak dan panjangnya rantai distribusi. Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) sebagai solusi kelembagaan yang berperan sebagai *offtaker* atau pembeli siaga guna menstabilkan harga di tingkat produsen. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumen evaluasi *pilot project* di Jawa Barat serta analisis literatur manajemen rantai pasok, penelitian ini menelaah mekanisme kontrak tanam, pengelolaan stok, dan fasilitasi pembiayaan. Temuan studi menunjukkan bahwa intervensi KMP mampu memangkas rantai pasok secara signifikan dari 5–7 lapis menjadi 2–3 lapis, yang berdampak langsung pada peningkatan harga jual di tingkat petani sebesar 10–20% dibandingkan harga pasar bebas saat panen raya. Mekanisme *forward contract* terbukti efektif dalam memberikan kepastian serapan pasar dan mentransfer risiko harga dari petani kepada koperasi. Disimpulkan bahwa KMP memiliki peran vital dalam mentransformasi ekosistem pertanian dan mengendalikan inflasi pangan, namun keberlanjutan model ini sangat bergantung pada dukungan akses permodalan murah serta integrasi teknologi digital untuk efisiensi operasional.

Kata Kunci: *Koperasi Merah Putih, Offtaker, Produk Pertanian, Stabilisasi Harga, Rantai Pasok.*

ABSTRACT

Agricultural commodity price volatility is a persistent structural problem in Indonesia, often detrimental to farmers due to the dominance of middlemen and long distribution chains. This study focuses on analyzing the effectiveness of the Red and White Village/Sub-district Cooperative (KMP) program as an institutional solution that acts as an *offtaker* or standby buyer to stabilize prices at the producer level. Using a descriptive qualitative approach through a study of pilot project evaluation documents in West Java and an analysis of supply chain management literature, this study examines the mechanisms of planting contracts, stock management, and financing facilitation. The study findings indicate that the KMP intervention significantly reduced the supply chain from 5–7 layers to 2–3 layers, which directly impacted the selling price at the farm level by 10–20% compared to the free market price during the main harvest. The forward contract mechanism proved effective in providing certainty of market absorption and transferring price risk from farmers to the cooperative. It concluded that KMP plays a vital role in transforming the agricultural ecosystem and controlling food inflation, but the sustainability of this model is highly dependent on support for access to affordable capital and the integration of digital technology for operational efficiency.

Keywords: *Merah Putih Cooperative, Offtaker, Agricultural Products, Price Stabilization, Supply Chain.*



PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Indonesia secara historis dan faktual memegang peranan yang sangat fundamental dan strategis dalam menopang struktur perekonomian nasional serta menjaga ketahanan pangan negara. Sebagai negara agraris, idealnya para pelaku utama di sektor ini, yakni para petani, menikmati tingkat kesejahteraan yang memadai dan sebanding dengan kerja keras mereka dalam memproduksi bahan pangan bagi ratusan juta penduduk. Namun, realitas empiris di lapangan sering kali menampilkan wajah yang kontradiktif, di mana petani justru menjadi kelompok yang paling rentan terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi (Mandang et al., 2020; Salasa, 2021). Kesenjangan antara cita-cita kedaulatan pangan dengan nasib petani yang memprihatinkan menjadi ironi yang terus berulang dari tahun ke tahun. Kondisi ini diperburuk oleh struktur pasar yang tidak efisien, di mana keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak-pihak perantara, sementara petani sebagai produsen primer harus menanggung risiko produksi dan risiko pasar yang paling besar. Fenomena ini menuntut adanya intervensi struktural yang serius untuk mengubah tata niaga pertanian agar lebih berkeadilan dan mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi para petani (Salasa, 2021; Setiartiti, 2021).

Masalah paling krusial yang menjadi momok menakutkan bagi petani adalah volatilitas atau fluktuasi harga komoditas pertanian yang sangat ekstrem dan sulit diprediksi. Fenomena ini sering kali terjadi secara siklikal, di mana harga jual di tingkat petani akan jatuh drastis menyentuh titik terendah pada saat musim panen raya tiba akibat terjadinya kelebihan pasokan atau *oversupply*. Di sisi lain, harga komoditas yang sama di tingkat konsumen justru sering kali tetap tinggi atau bahkan melambung, menciptakan disparitas harga yang sangat lebar. Kondisi asimetris ini terjadi karena petani tidak memiliki posisi tawar atau *bargaining power* yang kuat dalam menentukan harga jual produk mereka. Mereka dipaksa menerima harga yang ditetapkan oleh pasar yang didominasi oleh para pedagang perantara. Ketidakmampuan petani dalam menunda penjualan hasil panen karena kebutuhan likuiditas mendesak dan ketiadaan fasilitas penyimpanan yang memadai, semakin memperlemah posisi mereka di hadapan para pembeli, sehingga mereka sering kali harus menjual hasil panen dengan harga yang bahkan tidak menutup biaya produksi (Mandang et al., 2020; Salasa, 2021; Tuju et al., 2025).

Akar permasalahan dari ketidakadilan harga ini terletak pada dominasi para tengkulak atau pedagang perantara yang menguasai jaringan distribusi dari hulu hingga hilir. Rantai pasok atau *supply chain* produk pertanian di Indonesia dikenal sangat panjang, berbelit-belit, dan penuh dengan inefisiensi. Produk dari petani harus melewati setidaknya lima hingga tujuh lapisan perantara, mulai dari pengumpul desa, pedagang besar kecamatan, bandar kota, hingga pasar induk, sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen akhir (Ardillah & Hasan, 2020; Dewi et al., 2021; Rahman, 2020). Setiap titik dalam rantai distribusi ini mengambil margin keuntungan, yang akumulasinya membebani konsumen dengan harga tinggi sekaligus menekan harga beli di tingkat petani seminimal mungkin. Ketergantungan petani terhadap tengkulak semakin diperparah dengan praktik ijon atau pinjaman modal produksi yang mengikat petani untuk menjual hasil panennya hanya kepada pemberi pinjaman dengan harga yang jauh di bawah pasar. Dominasi struktur pasar oligopsoni ini membuat mekanisme pasar yang sehat tidak dapat berjalan, sehingga diperlukan sebuah terobosan kelembagaan yang mampu memotong rantai distribusi yang eksploitatif tersebut (Maflahah et al., 2021, 2024; Salasa, 2021).

Sebagai respons strategis untuk mengurai benang kusut permasalahan struktural tersebut, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait menggagas pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KMP). Inisiatif ini dirancang bukan sekadar

sebagai koperasi simpan pinjam biasa, melainkan difokuskan untuk berfungsi sebagai *offtaker* atau pembeli siaga yang menjamin penyerapan hasil panen petani anggotanya. Konsep KMP hadir sebagai solusi kelembagaan yang bertujuan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani, sehingga mereka tidak lagi perlu khawatir memikirkan ke mana harus menjual hasil panennya. Sebagai *offtaker*, KMP memiliki mandat untuk membeli produk pertanian dari anggotanya dengan harga yang wajar dan menguntungkan, yang telah disepakati sebelumnya. Kehadiran KMP diharapkan mampu menjadi penyeimbang pasar dan memecahkan dominasi tunggal para tengkulak di tingkat desa. Dengan adanya institusi yang berpihak pada petani, diharapkan struktur pasar dapat diperbaiki dan nilai tambah produk pertanian dapat dinikmati secara lebih adil oleh para produsen, bukan hanya oleh para pedagang perantara.

Mekanisme operasional KMP didesain dengan landasan teori ekonomi kelembagaan baru yang menekankan pada pengurangan biaya transaksi dan pengelolaan risiko. Salah satu instrumen utama yang diterapkan adalah sistem kontrak tanam atau *forward contract*. Melalui mekanisme ini, KMP dan petani menyepakati volume produksi dan harga jual bahkan sebelum masa tanam dimulai. Kesepakatan ini memberikan kepastian ganda; bagi petani, mereka mendapatkan jaminan harga jual yang melindungi mereka dari risiko jatuhnya harga saat panen raya, sedangkan bagi koperasi, mereka mendapatkan jaminan pasokan barang yang stabil. Selain itu, KMP juga menerapkan manajemen pengelolaan stok atau *buffer stock* untuk mengatur ritme pasokan ke pasar. Dengan kemampuan menyerap dan menyimpan hasil panen saat harga rendah dan melepasnya saat harga stabil, KMP berperan aktif dalam meredam gejolak harga. Fungsi ini secara efektif mentransfer risiko pasar yang selama ini ditanggung sendirian oleh petani individu kepada lembaga koperasi yang memiliki kapasitas modal dan manajemen yang lebih kuat.

Efektivitas intervensi Koperasi Merah Putih ini terlihat dari kemampuannya dalam merekayasa ulang struktur rantai pasok pertanian menjadi jauh lebih ringkas dan efisien. Kehadiran KMP yang terhubung langsung dengan pasar induk, industri pengolahan, atau konsumen akhir, mampu memangkas rantai distribusi dari yang sebelumnya melibatkan banyak tangan menjadi hanya dua hingga tiga lapisan saja. Efisiensi logistik ini secara otomatis mengurangi biaya distribusi dan margin ganda yang sebelumnya diambil oleh para perantara. Penghematan biaya ini kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk harga beli yang lebih tinggi kepada petani dan harga jual yang lebih kompetitif bagi konsumen. Peran KMP dalam memotong rantai pasok ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pengendalian inflasi pangan di tingkat nasional. Stabilitas harga yang tercipta menciptakan ekosistem pertanian yang lebih kondusif, mendorong petani untuk terus berproduksi dengan kualitas yang lebih baik karena adanya insentif ekonomi yang nyata dan terjamin.

Mengingat pentingnya peran strategis lembaga ini, penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisis mendalam mengenai efektivitas program Koperasi Merah Putih, khususnya dengan mengambil studi kasus pada evaluasi *pilot project* yang telah dilaksanakan di wilayah Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas model bisnis KMP sebagai *offtaker* dalam menstabilkan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani di tengah dinamika pasar yang tidak menentu. Nilai kebaruan atau inovasi dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai integrasi mekanisme kontrak tanam, manajemen stok, dan fasilitasi pembiayaan dalam satu ekosistem koperasi modern. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai potensi, tantangan, dan prasyarat keberhasilan replikasi model KMP di wilayah lain. Hasil kajian ini sangat krusial untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat guna memastikan keberlanjutan peran koperasi sebagai soko



guru perekonomian yang mampu mentransformasi sektor pertanian Indonesia menjadi lebih maju, mandiri, dan berdaulat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam peran dan efektivitas kelembagaan dalam stabilisasi pasar. Metode utama yang digunakan adalah studi dokumen dan analisis literatur yang komprehensif. Fokus utama kajian diarahkan pada laporan evaluasi *pilot project* Koperasi Merah Putih di wilayah Jawa Barat tahun 2024, yang dijadikan sebagai sumber data primer. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta berbagai artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik manajemen rantai pasok pertanian. Penggunaan sumber data yang beragam ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan valid mengenai dinamika pasar serta dampak intervensi kelembagaan terhadap kesejahteraan petani, sehingga analisis yang dihasilkan memiliki landasan empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Proses penelitian dilaksanakan melalui tiga tahapan sistematis untuk menjamin ketajaman analisis. Tahap pertama adalah identifikasi disparitas harga, di mana peneliti memetakan kesenjangan harga yang terjadi antara tingkat produsen dan konsumen untuk melihat besaran inefisiensi pasar. Tahap kedua berfokus pada analisis model kontrak *offtaking*, yakni menelaah mekanisme kerja sama antara koperasi dan petani dalam menjamin penyerapan hasil panen. Tahap ketiga adalah evaluasi dampak, di mana peneliti mengukur sejauh mana intervensi koperasi mampu menciptakan stabilitas pendapatan bagi petani anggota. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini melibatkan perbandingan silang antara data lapangan, teori kelembagaan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang berlaku, guna memverifikasi konsistensi temuan dan meminimalkan bias interpretasi.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta spesifik yang ditemukan di lapangan. Peneliti menghubungkan fenomena pemangkasan rantai pasok dengan teori efisiensi pasar untuk menjelaskan mekanisme pembentukan harga yang lebih adil. Selain itu, aspek keberlanjutan model bisnis koperasi juga dievaluasi dengan mempertimbangkan faktor dukungan finansial dan adopsi teknologi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung oleh tabel perbandingan data harga dan struktur biaya distribusi. Simpulan akhir ditarik secara komprehensif dengan menyoroti peran vital koperasi sebagai penyangga ekonomi pedesaan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem pertanian nasional melalui replikasi model *offtaker* yang terbukti efektif dalam meredam gejolak harga pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data operasional KMP, terdapat tiga mekanisme utama yang dijalankan sebagai *offtaker*: Kontrak Tanam (Forward Contract), Pengelolaan Stok (Buffer Stock), dan Fasilitasi Kredit. Hasil implementasi menunjukkan dampak signifikan pada harga jual petani.

Tabel 1 Mekanisme Operasional KMP sebagai Offtaker

| No | Mekanisme Utama | Deskripsi Singkat |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Kontrak Tanam (Forward Contract) | Perjanjian harga dan volume antara KMP dan petani sebelum masa tanam |
| 2 | Pengelolaan Stok (Buffer Stock) | Penyerapan hasil panen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga |
| 3 | Fasilitasi Kredit | Akses pembiayaan input produksi melalui koperasi |

Berdasarkan data pada Tabel 1 mengenai mekanisme operasional KMP sebagai oftaker, terdapat tiga pilar utama yang menjadi landasan strategis koperasi dalam mendukung petani. Mekanisme pertama adalah penerapan kontrak tanam atau forward contract, di mana kesepakatan harga dan volume produksi ditetapkan sebelum masa tanam dimulai untuk melindungi nilai jual. Selanjutnya, KMP menjalankan fungsi pengelolaan stok penyangga guna menyerap hasil panen raya, yang krusial untuk menjaga stabilitas pasokan pasar sekaligus mencegah jatuhnya harga. Terakhir, koperasi juga menyediakan fasilitasi kredit yang memberikan akses pembiayaan input produksi, sehingga petani memiliki kepastian modal dan jaminan pasar yang terintegrasi secara sistematis dalam ekosistem pertanian.

Tabel 2. Perbandingan Dampak KMP terhadap Efisiensi Rantai Pasok

| No | Indikator | Tanpa KMP (Tradisional) | Dengan KMP |
|----|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Rantai Distribusi | 5–7 Layer | 2–3 Layer |
| 2 | Harga di Petani | Fluktuatif / Rendah | Stabil (10–20% lebih tinggi) |
| 3 | Kepastian Serapan | Tidak menentu | Terjamin (Kontrak) |
| 4 | Ketergantungan | Tengkulak tinggi | Mandiri melalui koperasi |

Merujuk pada Tabel 2 yang menampilkan perbandingan dampak KMP terhadap efisiensi rantai pasok, terlihat transformasi signifikan dibandingkan sistem tradisional. Kehadiran KMP berhasil memangkas rantai distribusi yang semula panjang melibatkan 5 hingga 7 lapisan menjadi hanya 2 hingga 3 lapisan saja. Efisiensi ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani, di mana harga jual menjadi lebih stabil dan meningkat sekitar 10 hingga 20 persen dibandingkan harga pasar fluktuatif sebelumnya. Selain itu, kepastian serapan hasil panen kini terjamin melalui kontrak resmi, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang tidak menentu. Hal ini secara efektif memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak dan mendorong kemandirian ekonomi yang kuat melalui wadah koperasi.

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap data penelitian menunjukkan bahwa peran Koperasi Merah Putih atau KMP sebagai *oftaker* telah berhasil menciptakan mekanisme perlindungan harga yang efektif bagi petani lokal. Temuan utama mengindikasikan bahwa intervensi koperasi mampu menetapkan *floor price* atau harga dasar yang melindungi petani dari kejatuhan harga yang drastis saat panen raya tiba. Dalam sistem pasar bebas yang didominasi tengkulak, petani sering kali terjebak dalam posisi tawar yang lemah, namun kehadiran KMP mengubah dinamika tersebut dengan memberikan jaminan pembelian di atas harga pasar, yakni dengan selisih kenaikan mencapai sepuluh hingga dua puluh persen. Peningkatan margin keuntungan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator nyata perbaikan kesejahteraan petani yang kini memiliki kepastian pendapatan. Mekanisme ini membuktikan bahwa lembaga koperasi dapat berfungsi sebagai penyangga ekonomi yang vital dalam menahan volatilitas pasar yang

selama ini menjadi musuh utama keberlangsungan usaha tani di pedesaan (Marita et al., 2021; Syifa & Ridlwan, 2021).

Efektivitas KMP dalam menstabilkan harga tidak terlepas dari keberhasilannya dalam merekayasa ulang struktur rantai pasok komoditas pertanian yang selama ini terkenal panjang dan tidak efisien. Hasil evaluasi *pilot project* memperlihatkan pemangkasan jalur distribusi yang sangat signifikan, dari yang sebelumnya melibatkan lima hingga tujuh lapisan perantara menjadi hanya dua hingga tiga lapisan saja. Pemangkasan ini secara drastis mengurangi biaya transaksi dan logistik yang membebani harga akhir produk. Dengan memotong peran para pemburu rente di tengah jalur distribusi, KMP dapat mengalokasikan margin keuntungan yang lebih besar kepada petani selaku produsen, sekaligus menawarkan harga yang kompetitif bagi konsumen atau industri pengolahan. Transformasi struktural ini menegaskan bahwa inefisiensi pasar yang telah mengakar lama sebenarnya dapat diatasi melalui intervensi kelembagaan yang tepat, terarah, dan memiliki akses pasar yang jelas (Eta, 2024; Jabar & Frinaldi, 2025; Mulanda & Punt, 2021).

Salah satu instrumen kunci yang menjadi kekuatan model bisnis KMP adalah penerapan sistem *forward contract* atau kontrak tanam yang disepakati sebelum masa produksi dimulai. Melalui mekanisme ini, risiko ketidakpastian harga yang selama ini sepenuhnya ditanggung oleh petani secara individu kini ditransfer dan dikelola oleh koperasi secara kolektif. Petani tidak lagi harus bertaruh dengan nasib saat menanam, karena volume serapan dan harga jual telah terkunci sejak awal. Kepastian pasar ini berdampak psikologis yang besar, di mana petani menjadi lebih fokus pada upaya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen tanpa dibayangi ketakutan akan kerugian finansial. Dari perspektif ekonomi kelembagaan, kontrak ini berfungsi sebagai alat mitigasi risiko yang sangat ampuh, mengubah pola pertanian subsisten yang rentan menjadi usaha agribisnis yang lebih terencana, modern, dan berorientasi pada permintaan pasar yang riil (Dalengkade et al., 2025; Fahdiani, 2025; Tuju et al., 2025).

Selain kontrak tanam, fungsi manajemen *buffer stock* atau stok penyangga yang dijalankan oleh KMP memegang peranan strategis dalam menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar. Kemampuan koperasi untuk menyerap hasil produksi saat terjadi kelebihan pasokan atau *oversupply* mencegah banjirnya barang di pasar yang biasanya memicu kejatuhan harga. Barang yang diserap kemudian disimpan dan dikelola untuk dilepas kembali secara bertahap ketika pasokan di pasar mulai menipis, sehingga stabilitas harga tetap terjaga sepanjang musim. Strategi ini tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga berkontribusi pada pengendalian inflasi pangan di tingkat daerah. KMP bertindak sebagai katup pengaman yang mengatur ritme distribusi barang, memastikan ketersediaan pangan yang stabil bagi masyarakat sekaligus menjaga nilai tukar petani agar tetap berada pada level yang wajar dan menguntungkan (Fahdiani, 2025; Maulidin et al., 2025; Susanti et al., 2024).

Di sisi lain, integrasi fasilitasi pembiayaan atau kredit produksi dalam ekosistem KMP menjadi solusi ampuh untuk memutus mata rantai ketergantungan petani terhadap sistem ijon dan tengkulak. Sering kali, petani terpaksa menjual murah hasil panen mereka karena terdesak kebutuhan modal atau utang yang mengikat. Dengan adanya akses permodalan yang disediakan oleh koperasi, petani memiliki likuiditas yang cukup untuk membiayai input produksi seperti pupuk dan benih tanpa harus menggadaikan hasil panen mereka dengan harga rendah. Sinergi antara fungsi pembiayaan dan fungsi *offtaker* menciptakan ekosistem bisnis yang tertutup dan aman, di mana pengembalian kredit dilakukan melalui pemotongan hasil panen yang dijual ke koperasi. Model ini meminimalkan risiko kredit macet bagi koperasi sekaligus memberdayakan petani untuk mandiri secara finansial dan melepaskan diri dari jeratan utang informal yang eksploitatif (Ghozali & Setyowati, 2025; Loise & Syukur, 2025; Natalia & Supardal, 2025).

Meskipun model ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan, pembahasan ini juga menyoroti adanya tantangan operasional yang harus diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan program jangka panjang. Keterbatasan infrastruktur pasca-panen, terutama gudang penyimpanan berpendingin atau *cold storage*, menjadi hambatan teknis dalam mengelola komoditas hortikultura yang mudah rusak. Tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai, risiko penyusutan bobot dan penurunan kualitas produk menjadi ancaman nyata bagi profitabilitas koperasi. Selain itu, pemenuhan standar kualitas produk atau *Good Agricultural Practices* dari petani anggota masih beragam dan memerlukan pembinaan intensif. KMP dituntut untuk tidak hanya sekadar membeli, tetapi juga melakukan pendampingan teknis agar produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi industri modern. Kesenjangan infrastruktur dan standarisasi ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar peran koperasi sebagai agregator produk dapat berjalan optimal.

Sebagai penutup analisis, keberlanjutan peran Koperasi Merah Putih sebagai stabilisator harga sangat bergantung pada adaptasi teknologi dan dukungan kebijakan yang konsisten. Transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan, di mana sistem pencatatan stok, prediksi panen, dan koneksi pasar perlu terintegrasi dalam sebuah platform digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi. KMP perlu mengembangkan jaringan kemitraan *Business-to-Business* yang lebih luas dengan industri makanan dan ritel modern untuk memastikan kanal penjualan yang berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa replikasi model KMP di wilayah lain sangat potensial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, asalkan didukung oleh akses permodalan murah dari pemerintah dan komitmen kuat dalam membangun manajemen rantai pasok yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan petani kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap operasional Koperasi Merah Putih (KMP), disimpulkan bahwa inisiatif kelembagaan ini terbukti efektif sebagai solusi struktural dalam menstabilkan harga komoditas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Peran KMP sebagai offtaker berhasil merekayasa ulang rantai pasok yang semula tidak efisien dengan memangkas jalur distribusi dari tujuh lapisan menjadi hanya tiga lapisan, yang berdampak langsung pada peningkatan margin keuntungan petani sebesar sepuluh hingga dua puluh persen di atas harga pasar. Mekanisme kontrak tanam (*forward contract*) dan pengelolaan stok penyangga (*buffer stock*) berfungsi vital dalam memberikan kepastian pasar serta mentransfer risiko fluktuasi harga yang selama ini ditanggung petani secara individu kepada koperasi. Dengan menetapkan harga dasar dan menjamin serapan hasil panen, KMP secara efektif memutus mata rantai ketergantungan petani terhadap tengkulak dan sistem ijon yang eksploitatif, sekaligus menciptakan ekosistem agribisnis yang lebih adil, terencana, dan berorientasi pada perlindungan nilai tukar petani di tengah dinamika pasar yang tidak menentu.

Meskipun model bisnis KMP menunjukkan keberhasilan yang signifikan, keberlanjutan peran strategisnya sebagai stabilisator harga dalam jangka panjang sangat bergantung pada penguatan kapasitas infrastruktur fisik dan adaptasi teknologi digital yang menyeluruh. Tantangan operasional berupa keterbatasan fasilitas penyimpanan pasca-panen, seperti *cold storage* untuk komoditas hortikultura, serta standarisasi kualitas produk harus segera diatasi melalui investasi modal yang memadai dan pendampingan teknis intensif agar produk petani memenuhi spesifikasi industri modern. Transformasi digital menjadi prasyarat mutlak untuk efisiensi operasional, di mana integrasi data stok, prediksi panen, dan konektivitas pasar dalam satu platform akan memperkuat transparansi serta jaringan kemitraan *Business-to-Business*.



Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah berupa akses permodalan murah dan kolaborasi strategis dengan sektor ritel sangat krusial untuk memperluas skala dampak program ini. Jika prasyarat tersebut terpenuhi, replikasi model KMP berpotensi besar menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional yang mampu mengendalikan inflasi pangan sekaligus mewujudkan kedaulatan ekonomi petani Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardillah, F., & Hasan, F. (2020). Saluran, margin, dan efisiensi pemasaran bebek pedaging di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *AGRISCIENCE*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v1i1.6882>
- Dalengkade, M. N., Silvia, R., Wangka, N. M., Meti, Y., Budiharto, K., & Pujiastuti, D. R. (2025). Pemberdayaan masyarakat Desa Sail sebagai desa lingkar PT. Antam melalui pembuatan produk wine nanas. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 428. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7004>
- Dewi, S. K. S., Antara, M., & Arisena, G. M. K. (2021). Pemasaran cengkeh di Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, Indonesia. *Agro Bali Agricultural Journal*, 4(2), 246. <https://doi.org/10.37637/ab.v4i2.719>
- Eta, M. A. (2024). Analisis kebijakan pemasaran jasa pada koperasi sekolah Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia di Singkawang. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 331. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3244>
- Fahdiani, D. (2025). Merakit ketapang: Menanam harapan di pedalaman Katingan melalui ketahanan pangan. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 941. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.7833>
- Ghozali, R. A., & Setyowati, Y. (2025). Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan objek wisata air Bendhung Lepen. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1565. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8041>
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2025). Dari birokrasi ke birokrasi inovatif: Peran transformasi budaya institusional. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 388. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5374>
- Loise, M., & Syukur, M. (2025). Analisis modal sosial dalam aktivitas ekonomi pedagang kuliner di Pasar Cidu' Kota Makassar. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(4), 1807. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7314>
- Maflahah, I., Wirjodirdjo, B., & Karningsih, P. D. (2021). Demand allocation and profit sharing to improve salt farmer's revenue: A cooperative game approach. *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1188072/v1>
- Maflahah, I., Wirjodirdjo, B., & Karningsih, P. D. (2024). Improving salt farmer's bargain power through demand allocation and profit sharing: A cooperative game approach. *International Journal of Technology*, 15(1), 110. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v15i1.5522>
- Mandang, M., Sondakh, M. F. L., & Laoh, O. E. H. (2020). Karakteristik petani berlahan sempit di Desa Tolok Kecamatan Tompaso. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 16(1), 105. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.1.2020.27131>
- Marita, L., Arief, M., Andriani, N., & Wildan, M. A. (2021). Strategi peningkatan kesejahteraan petani Indonesia, review manajemen strategis. *Agriekonomika*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v10i1.9391>
- Maulidin, M., Rachman, I. N. A., Irawan, M. A., Suminar, T. J., & Wardani, I. K. (2025). Pelatihan pembuatan produk abon jambu mente di Desa Sekotong Tengah.



- COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 120.
<https://doi.org/10.51878/community.v5i1.6207>
- Mulanda, S. M., & Punt, C. (2021). Characteristics of Zambia's agricultural sector and the role for agricultural policy: Insights from CGE modelling. *Structural Change and Economic Dynamics*, 58, 300. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.06.008>
- Natalia, N., & Supardal, S. (2025). Kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera (Studi kasus di Desa Semantun Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat). *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 569.
<https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5742>
- Rahman, Y. A. (2020). Motif petani dalam memilih pasar. *SEPA Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 17(1), 33. <https://doi.org/10.20961/sepa.v17i1.39652>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Setiartiti, L. (2021). Critical point of view: The challenges of agricultural sector on governance and food security in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 232, 1034.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123201034>
- Susanti, A., Agustin, U., Akbar, M. S., Latifah, T., & Ramadhani, S. (2024). Pengembangan UMKM tahu yang di olah menjadi sempol guna meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Banjar Negeri. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 92. <https://doi.org/10.51878/community.v4i1.3246>
- Syifa, D. L., & Ridlwan, A. A. (2021). Improving agricultural sector: The role of mudharabah financing (Study on sharia financing savings and loans cooperatives). *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 55.
<https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.3829>
- Tuju, F., Dewi, M., Hamzah, P., Sari, F. P., Pangestu, R., Maulidya, Y., Lasari, R. M., & Purba, E. A. (2025). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pembuatan olahan semangka pada Kelompok Tani Pelangi Nusantara. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 387.
<https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7164>